

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara maju maupun negara berkembang pada umumnya memiliki masalah ekonomi yang sama seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat inflasi yang tinggi. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat umum dihadapi, hampir disetiap negara berkembang mempunyai masalah yang sama yaitu kemiskinan, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam buku yang dikarang oleh Nurkse tahun 1953, yang mengemukakan bahwa kemiskinan yang tinggi terjadi karena jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga menyebabkan turunnya investasi masyarakat baik pada pendidikan dan kesehatan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi.

Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang diterima di bawah minimum sehingga masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Rendahnya pendapatan dapat dipicu oleh rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selain itu proses penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang minim di Indonesia menyebabkan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga kemiskinan menjadi tinggi.

Kemiskinan struktural sering dilihat sebagai suatu gejala yang tetap di tengah-tengah masyarakat. Misalnya melihat kemiskinan struktural sebagai suatu fenomena yang *built-in* di mana ada suatu golongan sosial yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan itu. Dengan demikian kemiskinan struktural mencerminkan gejala ketidakmampuan yang melekat di dalam struktur sosial masyarakat (Pinem dkk., 2019).

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dari enam provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin yaitu sebesar 0.15 persen(BPS Provinsi Maluku Utara, 2021). Masalah peningkatan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara akibat pengaruh kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, kurangnya penyerapan tenaga kerja, dan minimnya anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Terdapat empat kabupaten di Maluku Utara yang jumlah penduduk miskinnya di atas 10 ribu jiwa, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Keberadaan perusahaan tambang di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Utara tidak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu proses perbaikan terus-menerus terhadap suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik, yang mana proses pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup demi kesejahteraan masyarakat serta harkat dan martabat manusia(Charles dkk., 2023). Pembangunan ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang tidak lepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan diukur dalam tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi ketimpangan pendapatan dapat menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Charles dan Karim (2023) indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian pada suatu periode tertentu adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDB) pada harga pasar berlaku atau pasar konstan. Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian

Maluku Utara memiliki pertumbuhan yang tinggi di kawasan regional. Faktor yang dominan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dari sisi permintaan adalah ekspor luar negeri, investasi (pembentukan modal tetap bruto), konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Meskipun ada perlambatan tertahannya harga komoditi utama Maluku Utara seperti kopra, pala, dan cengkeh turut memberikan andil terhadap turunnya konsumsi rumah tangga. Namun pertumbuhan ekonomi masih didominasi dengan meningkatnya ekspor luar negeri dari sektor pertambangan (Susanto and Pangesti 2021).

Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri dipengaruhi oleh harga sesuai dengan hukum permintaan dimana jika harga naik maka permintaan akan menurun. Kenaikan suatu barang akan meningkatkan tingkat Inflasi, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan menambah tingkat kemiskinan. Daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan akan menurun dikarenakan kenaikan harga barang secara umum dengan asumsi tingkat pendapatannya tetap. Tingkat pendapatan secara riil akan menurun manakala terjadi inflasi dan akibatnya adalah penurunan tingkat konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus menurun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan (Mufarrihah 2023).

Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate. Di tahun 2023 inflasi kota ternate lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Inflasi kota Ternate pada Desember 2023 mencapai 4,41% sedangkan inflasi nasional pada bulan dan tahun yang sama diangka 2,61%. Kenaikan inflasi di Kota Ternate dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan peningkatan permintaan. Sebagai contoh keterbatasan *supply* pada sub kelompok daging dan bumbu mengakibatkan meningkatnya permintaan. Permintaan yang tinggi pada sub kelompok

tersebut harus dipenuhi dari luar Maluku Utara yang membutuhkan biaya angkut yang cukup tinggi. Hal tersebut terkonfirmasi dari tingginya inflasi pada kelompok transport dan pengiriman.

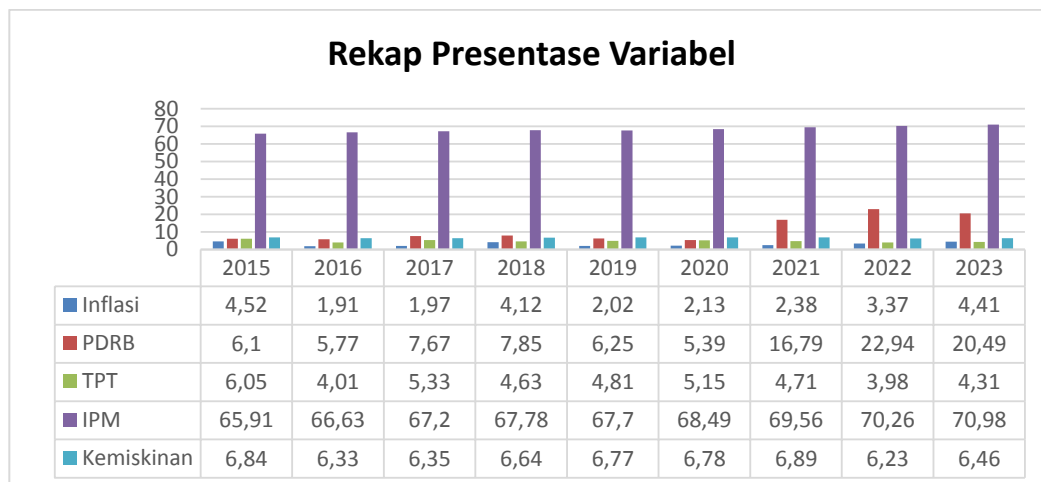
Terlepas dari Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Indeks pembangunan manusia dikatakan sebagai pengukur kesejahteraan dan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB perkapitanya (Sinambela dkk., 2024).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah tingkat pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah terus membaik, hal ini menandakan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika perekonomian tidak berkembang dengan baik, dampak terburuknya adalah pengangguran. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pengangguran. Pengangguran merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang sudah mencapai proporsi yang cukup mengkhawatirkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur meningkat (Aulia dkk., 2020). Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung serta merupakan bagian yang paling berat. Masalah pengangguran adalah salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya (Yehosua dkk., 2019).

Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara harus menjadi masalah yang diprioritaskan oleh Pemerintah karena kemiskinan menyangkut kehidupan manusia (dalam memperoleh kehidupan yang lebih layak). Banyak strategi atau pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun semua belum mampu untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara disebabkan pembangunan yang dilakukan tidak merata hanya difokuskan di daerah perkotaan saja sedangkan kondisi pembangunan di daerah pelosok masih sangat memprihatinkan.

Provinsi Maluku Utara memiliki beragam potensi ekonomi, dari sumber daya alam berbasis pertanian, kelautan dan pariwisata. Potensi ini diharapkan dapat diberdayakan secara maksimal sehingga meningkatkan perekonomian wilayah. Pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus bisa meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunkan tingkat kemiskinan.(Mashud dkk., 2018)

Pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun semua belum mampu untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara disebabkan pembangunan yang dilakukan tidak merata hanya difokuskan di daerah perkotaan saja sedangkan kondisi pembangunan di daerah pelosok masih sangat memprihatinkan. Berikut akan disajikan gambar inflasi, pertumbuhan ekonomi/PDRB, tingkat pengangguran terbuka, Indeks pembangunan manusia dan kemiskinan tahun 2015-2023.



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Gambar 1. 1 Grafik Data Jumlah Penduduk Miskin, Inflasi, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-202

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan dari periode 2015-2023 setiap tahunnya mengalami penurunan, kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen dan kemiskinan terendah di tahun 2022 diangka 6,23 persen, sedangkan inflasi berfluktuasi naik turun setiap tahunnya, di tahun 2015 terjadi inflasi yang cukup tinggi sebesar 4,52 persen hal ini disebabkan karena kenaikan harga BBM dan pangan dalam jangka waktu yang begitu cepat di tahun 2016 inflasi di angka 1,91 persen dan menjadi inflasi terendah periode 2015-2023. Sementara Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan berfluktuasi setiap tahunnya, PDRB tertinggi di tahun 2022 sebesar 22,94 persen hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan masyarakat yang diperoleh melalui kekayaan sumber daya alam, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja serta kemajuan teknologi sedangkan terendah pada tahun 2016 di angka 5,77 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka berfluktuasi setiap tahunnya, tingkat penganggura terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,05 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2023 IPM

mencapai angka 70,98 persen peningkatan tersebut terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Indeks pembangunan manusia di Maluku Utara terbilang cukup baik dan sesuai dengan data dari badan pusat statistika (BPS), IPM di Provinsi Maluku Utara setiap tahun mengalami peningkatan. Namun jika dilihat IPM dari seluruh provinsi di Indonesia kualitas IPM Maluku Utara berada dalam urutan terendah ke 6 pada tahun 2015 di atas Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Gorontalo, capaian IPM Provinsi Maluku Utara terakhir di tahun 2023 berada di urutan ke 5 ke lima terendah kurangnya ketersediaan, sarana kesehatan, pendidikan dan tidak seimbangnya perekonomian serta kurangnya akses terhadap semua sarana tersebut membuat provinsi Maluku Utara menjadi tidak unggul dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara pada Agustus 2023 sebesar 4,31 persen. Angka ini tercatat naik sebesar 0,33 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2022 yang sebesar 3,98 persen. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Provinsi Maluku Utara. Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT didominasi oleh lulusan SMK sederajat, yaitu sebesar 8,28 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 0,77 persen. Jika ditilik berdasarkan jenis kelamin maka, pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 3,94 persen dan TPT perempuan sebesar 4,94 persen. Mungkin ini juga penyebab adanya industri yang sebagian besar menyerap tenaga kerja laki-laki dibandingkan perempuan.

Inflasi di Kota Ternate tergolong rendah dan di bawah target yang ditetapkan RKPD 2020. Meskipun angka inflasi relatif terkendali, tetapi ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah yang ditunjukkan rendahnya net ekspor antar daerah, harus menjadi

perhatian. Pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah harus mengambil langkah antisipasi pengendalian inflasi Daerah. Salah satunya melalui stimulus terhadap pelaku usaha yang menghasilkan produk bahan makanan seperti komoditi pertanian dan hortikultura yang selama ini dipasok dari daerah lain.

Perekonomian Tahun 2023 tumbuh sebesar 20.49 dengan dominasi sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara lebih besar dibandingkan dengan nasional dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional kemudian Pemerintah Daerah harus memperhatikan penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang berkontribusi terbesar pada penciptaan PDRB. Apabila sektor pertanian tumbuh dan menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, maka fundamental perekonomian Maluku Utara akan semakin kokoh dan stabil.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah ada sebelumnya yaitu penelitian Ifaturrahmi, (2023) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2017 (Studi Kasus: 34 Provinsi)” dengan menambahkan variabel yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya serta menambah tahun observasi yang lebih panjang dengan harapan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid. Berdasarkan uraian diatas dan adanya perbedaan-perbedaan teori dan juga hasil penelitian, serta untuk melihat lebih lanjut mengenai indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Terbuka, Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Maluku Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan bukan masalah yang baru baik negara maju dan berkembang memiliki masalah yang sama. Kemiskinan berdampak pada perekonomian ada berbagai faktor yang menjadi penyebab yaitu Indeks pembangunan manusia, pengangguran terbuka, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ke empat faktor ini saling mempengaruhi dan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara?
- 2) Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara?
- 3) Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara?
- 4) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara?
- 5) Apakah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara
5. Untuk mengetahui dan menganalisis indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Penelitian ini dapat digunakankan sebagai sumber masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal membuat program dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan daerah khususnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Maluku Utara.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan bahan belajar bagi mahasiswa fakultas ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi pada khususnya.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian yang sejenis.